

RINGKASAN

Hernawan, Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Kebijakan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Banyumas) Pembimbing Utama Tesis : Dr. H. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.Hum., Pembimbing Pendamping Tesis : Dr. H. Setya Wahyudi, S.H., M.H.

Tesis ini mengangkat permasalahan bagaimanakah kebijakan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Banyumas dan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Banyumas. Metode penelitian tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, tipe penelitian deskriptif, Data yang diperlukan dalam penelitian tesis ini adalah data primer dan data sekunder, metode penyajian data yang diperoleh selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional yaitu keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan lainnya dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, analisis data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian tesis ini, akan dianalisa dengan mempergunakan metode kualitatif, yaitu membahas dan menjabarkan data hasil penelitian berdasarkan kaidah-kaidah, teori-teori dan doktrin dalam hukum pidana untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian dan pembahasan tesis ini, bahwa kebijakan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana perjudian di Kejaksaan Negeri Banyumas berdasarkan pada pedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011, dalam pelaksanaannya untuk menentukan berat ringan tuntutan pidana dilakukan secara berjenjang (Rencana Tuntutan). Dalam penelitian ini, JPU melakukan penuntutan pidana perjudian pada tahun 2015 dengan eskalasi yang cukup signifikan, dengan pertimbangan yuridis ketentuan Pasal 303 dan 303 bis KUHP jo Undang-undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan pertimbangan sosiologis antara lain karena faktor keadaan masyarakat, faktor ekonomi dan faktor individu, sebagai pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa dengan tujuan memberikan efek jera yang lebih sehingga upaya pencegahan dan penegakan hukum dapat terwujud. Selain itu adanya peran sentral dari pimpinan (Kajari) dan munculnya faktor non yuridis juga sangat menentukan penuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Berdasarkan penelitian, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak terpengaruh oleh adanya eskalasi tuntutan pidana. Selain dengan mempertimbangkan dasar yuridis dan sosiologis, mengingat pula berbagai variabel keadaan, sehingga hal ini dapat meminimalisir timbulnya disparitas putusan pidana terhadap tindak pidana perjudian.

SUMMARY

Hernawan, Science Program Concentration Law Law and the Criminal Justice System, Law graduate program UnSoed, Prosecution Policy Against Crime Gambling (Studies in Banyumas District Attorney Jurisdiction) Main Thesis Advisor : Dr. H. Kuat Puji Prayitno, S.H, M.Hum., Supervisor Assistants Thesis : Dr. H. Setya Wahyudi, S.H, M. H.

This thesis raises the issue of how a policy of prosecution by the Public Prosecutor (Prosecutor) against the crime of gambling in Banyumas District Court judge and how the legal considerations in the decision imposing the offenses gambling in Banyumas District Court. The research method of this thesis using qualitative methods with sociological juridical approach, descriptive research type, data is required in this thesis is the primary data and secondary data, method of data presentation were then presented in the form of descriptions arranged in a systematic, logical and rational that the overall data obtained will be connected to each other and adapted to the subject matter studied, data analysis of primary and secondary data collected in this thesis, will be analyzed by using qualitative methods, which discusses and describes the research data based on rules, theory-theory and doctrine in criminal law to address the problems studied.

The results of the study and discussion of this thesis, that the policy of prosecution by the public prosecutor against the crime of gambling in the State Attorney Banyumas based on the guidelines in Circular Letter of the Attorney General Number: SE-013 / A / JA / 12/2011 dated December 29, 2011, in implementation to determine criminal charges are made lighter weight gradually (Plan demands). In this study, the public prosecutor to prosecute criminal gambling in 2015 with a significant escalation, with juridical consideration the provisions of Article 303 and 303 bis Criminal Code jo Law No. 7 of 1974 on Control of Gambling and sociological considerations among others, because of the state of society , economic factors and the individual factors, as consideration of aggravating circumstances and relieve the defendant with the aim of providing a more deterrent effect so that prevention and law enforcement can be realized. Besides the central role of the leadership of district attorney and the emergence of non juridical factors also determine the criminal prosecution by the public prosecutor.

Based on research, the judges in the legal considerations are not affected by the escalation of criminal charges. In addition to considering the juridical and sociological basis, considering the various state variable, so that it can minimize the incidence of disparity in criminal verdict against gambling offenses.